

PENINGKATAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH OLEH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DI KABUPATEN MERAUKE

Christian Jhonfri Tambunan
NPP 28.1344

*Asdaf Kabupaten Merauke, Provinsi Papua
Program Studi Politik Pemerintahan
Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jatinangor*

Email: christianjhonfri@gmail.com

ABSTRACT

This article is entitled " "Increasing Community Political Participation In Regional Head Election By The National And Political Unity Agency In Merauke Regency" written by Christian Jhonfri Tambunan by email at christianjhonfri@gmail.com. This study aims to determine and analyze how to increase public political participation in the election of regional heads, the obstacles faced by efforts to increase public political participation in the election of the Regent and Deputy Regent, and the efforts made by the National Unity and Political Body of Merauke Regency in increasing public political participation in regional head elections. In this study, the data collection techniques used were interviews, and documentation. The data processing model in this study is by reducing data, presenting data, and drawing conclusions. The results of this study indicate that the implementation of political education The community service carried out by the National Unity and Political Agency of Merauke Regency has not been maximized, there are still shortcomings in its implementation, namely the lack of comprehensive socialization of Political Education so that there are still many people who do not understand political activities. The lack of coordination, resources, and inadequate facilities and infrastructure causes the implementation of this community political education not to reach the entire community of Merauke Regency. In addition, the lack of budget in the implementation of this activity has led to complaints from people whose areas do not receive political education socialization. The suggestions from the author in an effort to overcome these obstacles. The National Unity and Political Body of Merauke Regency must show that political education for the community is very important and necessary to establish good cooperation with Political Parties, Community Organizations, NGOs, Religious Leaders, Community Leaders, and Traditional Leaders in the community related to the implementation of political education.

Keywords : *Organization; Participation; Political Education; Regional Election; Society*

ABSTRAK

Artikel ini berjudul “Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Di Kabupaten Merauke” yang di tulis oleh Christian Jhonfri Tambunan dengan email christianjhonfri@gmail.com. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah, hambatan yang dihadapi upaya peningkatan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan upaya yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Merauke dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala daerah. Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dan dokumentasi. Model pengolahan data dalam penelitian ini dengan cara mereduksi data, penyajian data, dan mengambil kesimpulan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa bahwa penyelenggaraan pendidikan politik

masyarakat yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Merauke belum maksimal, masih terdapat kekurangan dalam penyelenggaraannya, yaitu kurang menyeluruhnya sosialisasi mengenai Pendidikan Politik sehingga masih banyak masyarakat yang belum memahami kegiatan politik. Kurangnya koordinasi, sumber daya, serta sarana dan prasarana yang belum memadai menyebabkan penyelenggaraan pendidikan politik masyarakat ini tidak sampai keseluruhan masyarakat Kabupaten Merauke. Selain itu kurangnya anggaran dalam penyelenggaraan kegiatan ini yang menyebabkan munculnya keluhan-keluhan dari masyarakat yang wilayahnya tidak mendapatkan sosialisasi pendidikan politik. Adapun saran dari penulis dalam upaya mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Merauke harus menunjukkan bahwa pendidikan politik bagi masyarakat merupakan sesuatu hal yang sangat penting dan perlu untuk menjalin kerja sama yang baik dengan Partai Politik, Organisasi Masyarakat, LSM, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh adat yang ada di masyarakat terkait penyelenggaraan pendidikan politik.

Kata Kunci : Masyarakat; Partisipasi; Pilkada; Pendidikan Politik; Penyelenggaraan

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia saat ini berada di dalam kategori negara berkembang yang memiliki sistem pemerintahan demokrasi. Pada umumnya sistem pemerintahan demokrasi ini dianggap akan lebih baik jika masyarakat banyak yang terlibat dan berpartisipasi di dalam politik. Partisipasi politik pada dasarnya adalah perbuatan yang dilakukan secara sukarela, tanpa adanya paksaan maupun tekanan dari pihak manapun dengan kesadaran penuh yang dimiliki. Kebebasan masyarakat dalam menyalurkan aspirasi politiknya sebagai bentuk partisipasi politik memberikan peluang bagi para partai politik berlomba-lomba menempatkan kader-kader terbaiknya di seluruh daerah di Indonesia termasuk Provinsi Papua.

Partisipasi Politik di Papua sebenarnya bukanlah hal yang baru bagi masyarakat disana. Dikarenakan semenjak bergabungnya Papua dengan Indonesia sendiri, dilakukan pemungutan pendapat rakyat atau dikenal dengan istilah pepera yang diadakan pada tanggal 2 Agustus 1969. Dengan adanya peristiwa ini menandakan bahwa masyarakat Papua sejatinya sudah melakukan partisipasi politik mereka pada permasalahan politik yang terjadi di masa itu.

Provinsi Papua merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mendapatkan otonomi khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Provinsi Papua sendiri memiliki jumlah penduduk sebanyak 3.435.430 Jiwa pada Tahun 2020. Dalam kurun waktu 5 Tahun terakhir Provinsi Papua telah melaksanakan pemilihan kepala daerah baik itu pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada Tahun 2018 maupun pemilihan bupati

dan wakil bupati yang dilakukan secara serentak pada Tahun 2015. Pada Tahun 2018 di Provinsi Papua persentase tingkat partisipasi masyarakat menunjukkan angka sebesar 89,40% dalam Pemilihan Gubernur.

1.2 Permasalahan

Terdapat beberapa permasalahan terkait partisipasi politik masyarakat di Papua yang penulis temukan. Ditingkat Provinsi menunjukkan angka partisipasi yang tinggi dan ini berbanding terbalik dengan tingkat kabupaten yang berada dibawahnya. Di wilayah Kabupaten Merauke masih banyak yang belum berpartisipasi aktif di politik dalam Pemilihan Bupati. Hal ini dikarenakan masih terdapatnya 37,36% masyarakat yang terdaftar sebagai DPT akan tetapi tidak berpartisipasi di dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat Kemudian nantinya pada Tahun 2020 akan diadakan pemilihan kepala daerah serentak yang melibatkan masyarakat di Kabupaten Merauke dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati periode 2020-2025.

Pemerintah Kabupaten Merauke memiliki tugas dan tanggung jawab penting terhadap peningkatan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang akan dilaksanakan pada Tahun 2020. Melalui organisasi perangkat daerah dan unsur terkait, yang diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam pesta demokrasi.

Bagian dari pemerintah daerah yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk peningkatan partisipasi politik masyarakat adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang disingkat BAKESBANGPOL serta merupakan Lembaga Teknis Daerah dengan bentuk sebagai Badan yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam peningkatan partisipasi politik masyarakat yang ada di Kabupaten Merauke. Berdasarkan Peraturan Bupati Merauke Nomor 31 Tahun 2012 tentang Tugas Fungsi Dan Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAKESBANGPOL mempunyai tugas dan tanggung jawab penting dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran partisipasi politik masyarakat. Dengan memfasilitasi masyarakat agar mendapat pembinaan dan pendidikan politik yang berupa sosialisasi mengenai pentingnya berpartisipasi di dalam politik terhadap

masyarakat sesuai dengan Peraturan Bupati Merauke Nomor 31 Tahun 2012 tentang Tugas Fungsi Dan Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Dijelaskan bahwa di dalam Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdapat bidang politik yang diatur pada pasal 16 sampai 18.

Berdasarkan pada uraian di atas, dapat dilihat bahwa adanya suatu permasalahan terkait dengan tingkat partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Merauke yang hanya sebesar 62,64% dan masih banyak masyarakat yang belum berpartisipasi aktif di dalam pemilihan kepala daerah yaitu sebesar 37,36%.

1.3 Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian terdahulu, dalam konteks partisipasi politik masyarakat di suatu daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Tia Subekti pada Tahun 2014 berjudul Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Magetan menemukan bahwa Partisipasi politik merupakan bagian yang paling penting dalam sebuah Pemilu. Dalam temuannya terdapat empat lembaga sosial yang turut berpengaruh dalam partisipasi politik masyarakat, dan faktor yang paling mempengaruhi adalah adanya praktik politik uang. Selain itu penelitian serupa juga dilakukan oleh L.M. Azhar Sa'ban, Anwar Sadat, dan Nastia yang berjudul Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Baubau Tahun 2018 mereka menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik yaitu rangsangan politik yang berasal dari media massa, karakteristik pribadi, dan keadaan politik.

Dalam upaya peningkatan partisipasi politik penulis juga terinspirasi dari penelitian terdahulu mengenai peningkatan partisipasi politik. Doni Hendrik dalam penelitiannya yang berjudul variabel-variabel yang Mempengaruhi Rendahnya Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2008 yang menunjukkan bahwa variabel sosialisasi politik yang rendah merupakan variabel yang menyebabkan rendahnya partisipasi politik masyarakat dalam pilkada kota Padang tahun 2008. Rizki Priandi dan Kholis Roisah melakukan suatu penelitian berjudul Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Umum di Indonesia ini memiliki hasil dimana naik dan menurunnya

keterwakilan perempuan didalam parlemen dapat dipicu karena kebijakan yang sama, karena pada dasarnya gairah kaum perempuan dalam dunia politik jika tidak ditompang dengan upaya-upaya serta kebijakan yang lebih memacu jumlah keterwakilan akan berakibat menurun. Selain itu penulis juga melihat dari penelitian lain yang menunjukkan bahwa adanya peran serta dari suatu lembaga yang memiliki pengaruh terhadap partisipasi politik seperti yang dilakukan Siti Isnaini Idana, Misran Safar, dan Abdul Halim Momo dengan judul penelitian Peranan Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Menyelenggarakan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat dengan hasil pihak KPUD melakukan beberapa langkah dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat mengikuti pemilihan umum daerah adalah memberikan edukasi politik, memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat guna, mendorong masyarakat agar ada kesadaran tersendiri, kesadaran tersendiri inilah yang mendorong mereka untuk menggunakan hak pilihnya pada saat hari pemilihan.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dari penelitian sebelumnya, dimana konteks penelitian yang penulis lakukan disini mengenai peningkatan partisipasi politik masyarakat yang dipengaruhi oleh suatu badan milik pemerintah daerah yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Merauke. Penelitian yang penulis lakukan ini memiliki objek penelitian yaitu seluruh masyarakat yang berdiam di wilayah Kabupaten Merauke. Dalam penelitian ini pun penulis menggunakan indikator dari teori yang berbeda dari penelitian terdahulu yakni menggunakan teori partisipasi politik yang dikemukakan James Roseau (Efriza, 2012:185) yang menyatakan bahwa partisipasi politik seseorang dipengaruhi oleh gaya partisipasi, motif partisipasi, dan konsekuensi seseorang dalam partisipasi politik.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai peningkatan partisipasi politik masyarakat yang terjadi di Kabupaten Merauke.

II. METODE

Penulis Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat tentang fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki dengan menggambarkan secara jelas dan rinci mengenai peningkatan partisipasi politik masyarakat yang ada di Kabupaten Merauke Provinsi Papua seiring berjalannya waktu dari tahun 2015 hingga 2020. Kemudian penulis memakai pendekatan induktif dikarenakan penulis ingin mengamati secara langsung dengan mengumpulkan data dan informasi (khusus) yang dapat digunakan sebagai pendukung penelitian pada tempat magang sehingga mendapatkan hasil kesimpulan yang umum.

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Penulis melakukan wawancara terhadap 20 informan yang terdiri dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Merauke, Kepala Bidang Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Merauke, Kepala Subbidang Implementasi Kebijakan Publik dan Pendidikan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Merauke, Ketua KPU Kabupaten Merauke, Partai Politik peserta Pilkada 2020, Calon Bupati peserta Pilkada 2020, Masyarakat Kabupaten Merauke perwakilan Distrik sebanyak 10 orang. Kemudian dalam teknik analisis data menggunakan teknik reduksi, penyajian data, dan penyimpulan. Adapun analisisnya menggunakan teori partisipasi politik yang digagas oleh James Roseau dalam Efriza (2012 :185) untuk menganalisis terkait perkembangan partisipasi politik masyarakat dalam pemilukada di Kabupaten Merauke dengan dimensi partisipasi yang dapat mempengaruhi partisipasi politik masyarakat pada penyelenggaraan pemilu.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

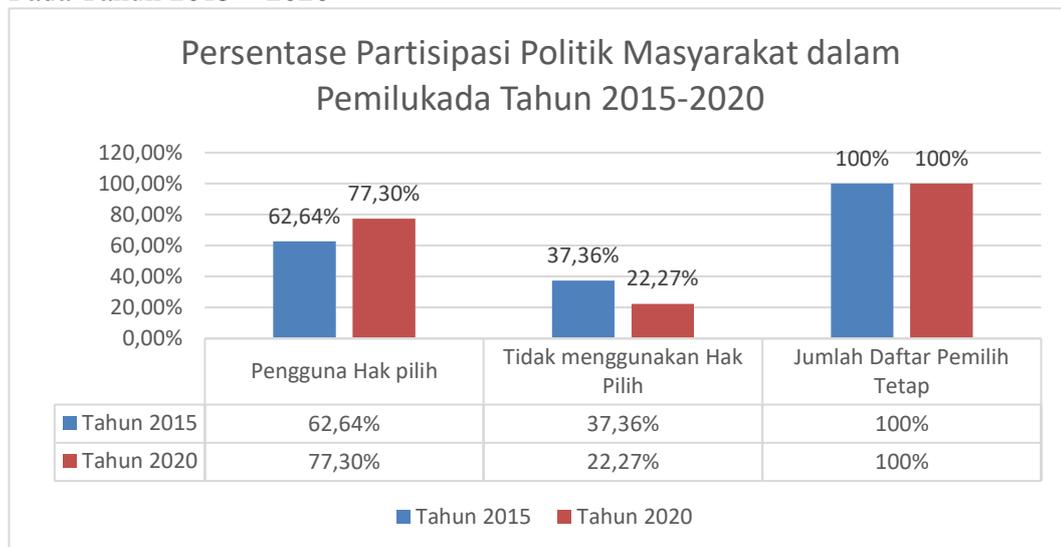
3.1 Perkembangan Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Merauke

Partisipasi politik yang terjadi di Kabupaten Merauke dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dari Tahun 2015 hingga 2020 telah mengalami perkembangan yang dapat dikatakan meningkat. Dapat dikatakan seperti ini dikarenakan data yang penulis peroleh dari pihak KPU Kabupaten Merauke menunjukkan adanya kenaikan angka partisipasi pemilu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati periode 2020-2025 pada tanggal 9 Desember 2020. Partisipasi pemilu pada pemilihan ini meningkat daripada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebelumnya pada Tahun 2015.

Berdasarkan data yang didapati dari KPU Kabupaten Merauke angka partisipasi masyarakat Kabupaten Merauke mencapai angka 77,30% dengan jumlah pengguna hak pilih 107.540 suara dari 138.348 Daftar Pemilih Tetap yang terdaftar mengikuti Pemilukada. Pencapaian ini merupakan hal baru di Kabupaten Merauke, untuk pertama kalinya angka partisipasi politik masyarakat mengalami kenaikan dari Tahun-Tahun sebelumnya.

Tabel 1.

Grafik Kenaikan Persentase Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Merauke Pada Tahun 2015 – 2020



Terjadinya kenaikan angka partisipasi politik masyarakat dalam keikutsertaan masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati yang di laksanakan dari Tahun 2015 dan 2020. Dapat dilihat juga bahwa pada Tahun 2015 memiliki persentase partisipasi dalam pemilu sebesar 62,64% yang mengalami kenaikan pada Tahun 2020 dengan persentase partisipasi masyarakat sebesar 77,30%. Hal ini merupakan suatu capaian baru bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Merauke dikarenakan berhasil menjalankan salah satu tugas dan fungsinya di Bidang Politik untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dalam jangka waktu 5 Tahun sehingga menghasilkan kenaikan angka persentase partisipasi politik sebesar 14,66%.

James Roseau dalam Efriza (2012 :185) mengatakan bahwa terdapat beberapa dimensi yang mempengaruhi partisipasi politik yang dilakukan masyarakat sesuai dengan penelitian yang penulis lakukan terhadap masyarakat Kabupaten Merauke memiliki hasil sebagai berikut:

a) Gaya Partisipasi

Masyarakat Kabupaten Merauke dalam melakukan partisipasi politik memiliki gaya partisipasi yang dilakukan secara langsung tanpa diwakilkan, Keikutsertaan dalam mendukung salah satu pasangan calon yang didukung secara tak kentara, partisipasi pemilu yang dilakukan bersifat individual, pola pemikiran dalam memilih yang berbeda-beda, ada yang berpikir secara sistematis dan ada juga yang acak atau random, bentuk dukungan yang dilakukan secara tersembunyi, memiliki komitmen dalam mengikuti pemilu, dan berpartisipasi disebabkan oleh derita yang dialami dengan mengharapkan adanya perubahan terhadap dirinya melalui partisipasinya.

b) Motif Partisipasi

Motif Partisipasi yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Merauke berdasarkan data yang penulis peroleh dari wawancara dengan narasumber dan dianalisis menggunakan indikator-indikator yang dikemukakan oleh James Roseau dalam teorinya menunjukkan bahwa masyarakat memiliki Motif Partisipasi dimana masyarakat sudah memiliki kesadaran dan mulai berpartisipasi secara sengaja, berpartisipasi politik karena adanya faktor

emosional antara masyarakat dengan pasangan calon yang dipilihnya, partisipasi dikarenakan kebutuhan sosial akan sosok pemimpin ditengah masyarakat komunal, motif partisipasi masyarakat ada yang berasal dari dalam diri sendiri dan ada juga yang dipengaruhi dari luar seperti pengaruh dari Pendidikan Politik yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan masyarakat masih memilih tanpa berpikir, dalam artian banyak yang memilih tanpa melihat seluk beluk dari pasangan calon kepala daerah.

c) **Konsekuensi Partisipasi Seseorang Dalam Politik**

Konsekuensi Partisipasi seseorang dalam politik yang terjadi di Kabupaten Merauke berdasarkan hasil analisis dari data yang penulis peroleh dalam wawancara. Menunjukkan bahwa masyarakat menerima konsekuensi mereka dalam berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah yang pernah diselenggarakan di Kabupaten Merauke baik pada Tahun 2015 dan 2020 memperlihatkan bahwa pada hasil pemilu Tahun 2015 yang diikuti masyarakat mempunyai dampak konsekuensi yang disfungsi karena banyak masyarakat yang mengeluh selama Tahun 2015-2020 banyak yang tidak sesuai dengan tujuan masyarakat, konsekuensi berikut yang diterima masyarakat adalah konsekuensi yang terputus, dimana terjadi perubahan baik dari tatanan pemerintahan, kehidupan sosial, dan kekuatan politik yang ada, dan periode kepemimpinan pada Tahun 2015-2020 menghasilkan konsekuensi yang berupa tuntutan dari masyarakat akan kinerja yang dilakukan pejabat pemerintahan pada masa itu.

3.2 Faktor Penghambat dalam Upaya Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Merauke

Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Kabupaten Merauke, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Merauke dihadapkan pada beberapa faktor penghambat dalam mencapai hasil yang 126 maksimal. Dapat dilihat pada hasil pemilihan kepala daerah pada tanggal 9 Desember 2020 kemarin.

Kendala-kendala yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Merauke dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat melalui program pendidikan politik masyarakat yang dijalankan mereka sejak Tahun 2016 dihadapkan dengan berbagai faktor penghambat. Adapun faktor-faktor penghambat yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Merauke adalah sebagai berikut:

- a) Pandemi Covid-19, akibat dari pandemi ini menyebabkan Kabupaten Merauke mengalami lockdown yang membatasi aktivitas semua orang sehingga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pun berhenti melakukan sosialisasi pendidikan politiknya ke wilayah distrik
- b) Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik masyarakat untuk membangun etika, moral dan budaya politik bangsa dalam demokrasi, hal ini menghambat proses peningkatan partisipasi politik oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- c) Belum optimalnya infrastruktur politik dalam melaksanakan fungsi pendidikan dan kaderisasi politik sebagai pilar demokrasi, partai politik di Kabupaten Merauke seakan menghilang dari aktivitasnya setelah terselenggaranya pemilu.
- d) Kebebasan menyampaikan aspirasi tanpa memperhatikan norma dan etika yang menunjukkan perilaku masyarakat yang belum dewasa dalam berdemokrasi, sesuai dengan fakta di lapangan dimana banyak masyarakat Kabupaten Merauke yang menyampaikan aspirasi secara sembarangan
- e) Alokasi anggaran dari APBD belum memadai. Keterbatasan dana yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Merauke akibat pandemi covid-19.
- f) Keterbatasan sumber daya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki keterbatasan sumber daya dalam melaksanakan sosialisasi pendidikan politik dikarenakan hanya memiliki 34 pegawai. Ini ditunjukkan dengan dibuatnya program pendidikan politik masyarakat yang dilakukan setiap 3 bulan sekali dalam 1 distrik, dan itupun tidak bisa langsung mencakup seluruh masyarakat yang ada dalam distrik itu.

- g) Penyelenggaraan pendidikan politik belum mampu menjangkau seluruh wilayah distrik hingga ke pelosok distrik karena kondisi geografis yang sulit dijangkau menyebabkan pembinaan politik masyarakat belum optimal.
- h) Kurangnya respon dari pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan politik seperti forum dialog publik sehingga komunikasi politik kurang berkembang.

3.3 Upaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Merauke

Merespon berbagai faktor yang menjadi penghambat ataupun kendala dalam peningkatan partisipasi politik masyarakat Kabupaten Merauke oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Merauke secara maksimal. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan beberapa upaya-upaya untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Merauke sebagai berikut:

- a) Upaya yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Merauke dalam meningkatkan partisipasi politik ditengah pandemi dilakukan dengan tetap melakukan sosialisasi pendidikan politik kepada masyarakat distrik dengan memperhatikan protokol kesehatan ditengah pandemi covid-19.
- b) Mengoptimalkan pelaksanaan pendidikan politik masyarakat dengan melakukan koordinasi dengan partai politik, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama yang berada diseluruh wilayah distrik untuk membangun etika, moral dan budaya politik yang baik dengan pembinaan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- c) Mengoptimalkan fungsi infrastruktur politik dalam pendidikan dan kaderisasi politik melalui peningkatan komunikasi ataupun dialog politik dan koordinasi serta kerjasama antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Partai Politik yang berada di Kabupaten Merauke dalam upaya

penyebaran pemahaman politik keseluruhan masyarakat baik dalam keikutsertaan masyarakat dalam pilkada, maupun kaderisasi partai.

- d) Memberikan edukasi politik yang baik kepada masyarakat mengenai tatacara berdemokrasi yang benar dengan memperhatikan norma-norma yang berlaku dan etika yang benar. Penyampaian aspirasi yang seharusnya dilakukan tanpa merugikan pihak manapun.
- e) Mengefektifkan anggaran yang ada dengan melakukan program pendidikan politik jarak jauh menggunakan media online seperti penggunaan media sosial agar mengurangi penggunaan anggaran sesuai dengan keterbatasan anggaran yang tersedia.
- f) Mengefektifkan sumber daya yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melakukan sosialisasi pendidikan politik kepada masyarakat.
- g) Mengoptimalkan fasilitasi pembinaan dan pendidikan politik kepada masyarakat tidak hanya melalui sosialisasi pendidikan politik secara langsung, melainkan bisa juga dilakukan secara online.
- h) Melakukan dialog dengan pemerintah daerah antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam meningkatkan penyelenggaraan pendidikan politik. Dengan berlandaskan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Program pendidikan politik masyarakat yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dilakukan secara konsisten memiliki pengaruh terhadap kenaikan partisipasi politik masyarakat, berdasar hasil penelitian yang dilakukan penulis terdapat pengakuan beberapa masyarakat yang mengatakan bahwa mereka berpartisipasi pemilu karena pernah mendapatkan sosialisasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, hal ini berbeda dengan temuan L.M. Azhar Sa'ban, Anwar Sadat dan Nastia. Mereka menemukan bahwa masyarakat berpartisipasi akibat rangsangan politik dari media massa, karena pada zaman modern seperti ini media massa merupakan sarana informasi yang sangat mudah sekali diakses oleh masyarakat, dan dari ini masyarakat dapat mengetahui informasi dan mengenal

sapa saja calon Wali Kota dan Wakil Walikota. Kemudian faktor karakteristik pribadi, pendidikan agama yang diberikan sejak dini besar sekali pengaruhnya terhadap masyarakat untuk ikut berpartisipasi politik karena masyarakat Kota BauBau sangat kental dengan pendidikan agamanya maka masyarakat lebih condong untuk memilih pasangan Wali Kota dan Wakil Walikota yang dapat menjaga amanah dan dapat bertanggung jawab untuk memimpin Kota BauBau. Dan yang faktor terakhir menurut mereka keadaan politik apabila suatu daerah keadaan politiknya tidak mengalami tekanan dari dalam maupun luar, masyarakat akan lebih merasa bebas dan akan mempunyai keinginan dan kesadaran untuk mengikuti partisipasi politik.

Sedangkan hasil penelitian yang penulis peroleh bahwa masyarakat di Kabupaten Merauke sendiri banyak yang terpengaruh melalui partai politik, KPU, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik secara langsung. Hal ini dikarenakan Kabupaten Merauke memiliki wilayah yang luas dan tidak semua distrik memiliki akses yang bagus, baik dalam akses transportasi maupun transmisi sinyal telepon seluler, kondisi geografis Kabupaten Merauke terdiri dari sebagian besar wilayah hutan. Jadi mau tidak mau dalam proses sosialisasi pendidikan politik guna mempengaruhi partisipasi politik hanya ada satu cara yaitu melalui terjun langsung ke masyarakat melalui sosialisasi politik. Selain itu karakteristik masyarakat Kabupaten Merauke yang beragam mempengaruhi partisipasi politik seperti tingkat pendidikan yang dienyam masyarakat. Dan masyarakat Kabupaten Merauke bukanlah tipe masyarakat yang mudah terpengaruh oleh keadaan politik, akan tetapi lebih memilih menunjukkan suaranya dalam diam melalui pemilukada.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penulis terhadap peningkatan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Merauke serta keterkaitannya dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, maka penulis dapat menarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

- a. Perkembangan partisipasi politik masyarakat Kabupaten Merauke pada pilkada Tahun 2015 hingga 2020 mengalami kenaikan sebesar 14,66%,

peningkatan ini terjadi karena masyarakat Kabupaten Merauke mulai memiliki kesadaran berpartisipasi politik dengan gaya partisipasi yang aktif akibat faktor derita yang dialami ditambah dengan disfungsi yang terjadi pada masa kepemimpinan sebelumnya yang menyebabkan banyak tuntutan sehingga mendorong motif partisipasi masyarakat berpartisipasi secara sadar yang didukung juga oleh faktor eksternal yang mengarahkan masyarakat untuk berpartisipasi baik dari pihak Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, KPU dan Partai Politik pada saat kampanye. Namun masih terlihat bahwa masyarakat Kabupaten Merauke masih memiliki keterikatan emosional yang ada antara pemilih dan calon yang dipilih.

- b. Faktor-faktor penghambat dalam upaya yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Merauke yaitu adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan lockdown pada Tahun 2020, pendidikan politik yang belum optimal dalam membangun etika, moral dan budaya politik, infrastruktur politik yang belum optimal dalam pelaksanaan fungsi pendidikan politik dan kaderisasi politik, penyampaian aspirasi masyarakat belum dewasa tanpa memperhatikan norma dan etika, anggaran yang belum memadai, keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, penyelenggaraan pendidikan politik yang belum menjangkau seluruh wilayah serta kurangnya respon dari pemerintah daerah terhadap kegiatan pendidikan politik.
- c. Upaya yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mengatasi hambatan yang ada yaitu melanjutkan sosialisasi pendidikan politik dengan penerapan protokol kesehatan ketat, pengoptimalan pendidikan politik untuk membangun etika, moral dan budaya politik, pengoptimalan fungsi infrastruktur politik, pemberian edukasi politik tentang tata cara penyampaian aspirasi dengan memperhatikan etika dan norma-norma, pengaktifan anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan program pendidikan politik, pengaktifan sumber daya manusia yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik , pengoptimalan fasilitas

pembinaan dan pendidikan politik, dan melakukan dialog antar pemerintah daerah dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Keterbatasan penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yaitu waktu dan biaya penelitian. Penelitian hanya bisa dilakukan dalam beberapa sampel distrik yang bisa penulis datangi, dan tidak semua masyarakat yang penulis wawancarai mengikuti pemilu sehingga penulis harus mencari masyarakat yang tepat untuk menggali informasi mengenai partisipasinya dalam pemilu.

Arah masa depan penelitian(*future work*). Penulis disini menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa yang berkaitan dengan peningkatan partisipasi politik masyarakat yang terjadi di Kabupaten Merauke agar mendapatkan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Merauke beserta jajaran yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melakukan penelitian, Komisi Pemilihan Umum, seluruh Partai Politik yang ada di Kabupaten Merauke, seluruh masyarakat Kabupaten Merauke yang menjadi informan dalam penelitian. Serta seluruh pihak yang telah membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian yang dilakukan penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Miriam. 2013. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia
- Cangara, Hafied. 2014. *Komunikasi Politik: Konsep Teori & Strategi*. Raja Grafindo Persada Utama
- Efriza. 2012. *Political Explore : Sebuah Kajian Ilmu Politik*. Bandung: Alfabeta
- Horton, Paul dan Chester L. Hunt. 1998. *Sosiologi*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Huntington, Samuel dan Joan Nelson. 1994. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta
- Kartini, Kartono. 1996. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Bandung: CV. Rajawali

- Mardalis. 2010. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara
- Miaz, Yalvema. 2012. *Partisipasi Politik Pola Perilaku Pemilih Pemilu Masa Orde Baru dan Reformasi*. Padang: UNP PRESS
- Mujani, Saiful. 2012. *Kuasa Rakyat*. Bandung: Mizan Publik
- Nazir, Mohammad. 2013. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Noor, Juliansyah. 2013. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kendana Prenada Media Group
- Sahid, Komarudin. 2011. *Memahami Sosiologis Politik*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Unpar Press
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sumaryadi, I Nyoman. 2010. *Sosiologi Pemerintahan*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Supriyadi, Dedi. 1999. *Mengangkat Citra dan Martabat Guru*. Yogyakarta: Adicita Karya
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Politik
- Peraturan Bupati Merauke Nomor 31 Tahun 2012 tentang Tugas Fungsi Dan Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Merauke
- KPU. 2015. Pilkada Kabupaten Merauke. Diakses dari Komisi Pemilihan Umum : www.kpu.go.id. Pada tanggal 21 September 2020
- KPU. 2018. Pilkada Provinsi Papua. Diakses dari Komisi Pemilihan Umum : www.kpu.go.id. Pada tanggal 21 September 2020
- Hendrik, Doni. 2010. Variabel-variabel yang Mempengaruhi Rendahnya Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2008. *Jurnal Demokrasi*. Vol 9: 137-148
- L.M. Azhar Sa'ban, Anwar Sadat, Nastia. 2019. Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Baubau Tahun 2018. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol 4(1): 29-38

- Nambo, Abdulkadir. 2005. Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik (Suatu Telaah dari Sistem Politik). *Jurnal Sosial dan Pembangunan*. Vol 21(2): 262-285
- Rizki Priandi, Kholis Roisah. 2019. Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol 1(1): 106-116
- Siti Isnaini Idana, Misran Safar, Abdul Halim Momo. 2018. Peranan Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Menyelenggarakan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat. *Jurnal Selami IPS*. Vol 3(47): 232-237
- Subekti, Tia. 2014. Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol 6(35): 51-66